

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MEMBANGUN DAN MENUMBUHKAN  
KARAKTER ANTI KORUPSI MENURUT KITAB MATIUS DI SD SWASTA  
LATIHAN HKBP PEARAJA TARUTUNG**

**Lela Adelia Manullang, Roma Malau, Andar Gunawan Pasaribu**

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

[lelaadeliamanullang02@gmail.com](mailto:lelaadeliamanullang02@gmail.com) [romamalau9@gmail.com](mailto:romamalau9@gmail.com)

[andargunawanpasaribu5@gmail.com](mailto:andargunawanpasaribu5@gmail.com)

**Abstrak**

Injil Matius menawarkan banyak prinsip yang relevan dengan pendidikan anti-korupsi melalui ajaran Yesus tentang integritas, keadilan, dan pertanggungjawaban. Yesus dalam Injil ini sering mengkritik pemimpin agama yang munafik dan menekankan pentingnya ketulusan hati serta perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Khotbah di Bukit, Yesus menegaskan nilai kejujuran dan keadilan sebagai dasar bagi kehidupan yang berkenan kepada Allah, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersih dan tindakan yang benar. Pendidikan anti-korupsi dalam perspektif Injil Matius dapat dikembangkan melalui nilai-nilai seperti ketulusan, tanggung jawab, dan pelayanan kepada sesama. Perumpamaan tentang talenta dan bendahara yang tidak jujur menunjukkan pentingnya pengelolaan yang baik atas sumber daya serta dampak negatif dari penyalahgunaan kepercayaan. Amanat Agung di akhir Injil juga menegaskan perlunya membangun komunitas yang berdasarkan kebenaran dan ketaatan kepada Allah, yang dapat menjadi landasan dalam membangun budaya anti-korupsi di masyarakat.

Kata kunci : Matius, pendidikan anti korupsi, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, amanat agung, ketaatan kepada Allah, budaya anti-korupsi

**Abstract**

The Gospel of Matthew offers many principles relevant to anti-corruption education through Jesus' teachings about integrity, justice, and accountability. Jesus in this Gospel often criticizes hypocritical religious leaders and emphasizes the importance of sincerity and behavior that is in accordance with God's will. In the Sermon on the Mount, Jesus emphasized the value of honesty and justice as the basis for a life pleasing to God, teaching that true happiness comes from a clean heart and right actions. Anti-corruption education from the perspective of the Gospel of Matthew can be developed through values such as sincerity, responsibility and service to others. The parable of the talents and the dishonest treasurer shows the importance of good management of resources as well as the negative impact of the doctrine of trust. The Great Commission at the end of the Gospel also emphasizes the need to build a community

based on truth and obedience to God, which can be the basis for building an anti-corruption culture in society.

Keywords : Matthew, anti-corruption education, justice, honesty, responsibility, the great commission, obedience to God. anti-corruption culture.

## **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu masalah sosial yang merusak tatanan moral dan etika dalam masyarakat. Praktik ini tidak hanya menyebabkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, lembaga pendidikan, dan bahkan komunitas keagamaan. Dalam konteks pendidikan, upaya membangun dan menumbuhkan karakter anti-korupsi menjadi sangat penting untuk membentuk individu yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk moralitas peserta didik agar menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

Kitab Matius, sebagai bagian dari Injil dalam Perjanjian Baru, memberikan banyak ajaran yang relevan dalam membangun karakter anti-korupsi. Yesus Kristus, melalui pengajaran-Nya, menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, ketulusan, keadilan, dan pelayanan tanpa pamrih. Dalam Khotbah di Bukit (Matius 5–7), misalnya, Yesus mengajarkan tentang kemurnian hati, integritas, dan sikap hidup yang menjauhi ketamakan. Selain itu, kisah-kisah seperti perjumpaan Yesus dengan pemungut cukai Matius (Matius 9:9-13) dan Zakheus (Lukas 19:1-10) menunjukkan bagaimana perubahan karakter yang berlandaskan pertobatan dapat membawa dampak positif dalam kehidupan seseorang dan komunitasnya.

Implementasi pendidikan anti-korupsi berdasarkan Kitab Matius dapat diterapkan melalui berbagai pendekatan, termasuk pembelajaran berbasis nilai, keteladanan, dan refleksi etis dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, peserta didik diajak untuk memahami bukan hanya dampak negatif korupsi, tetapi juga bagaimana ajaran Kristus dapat menjadi dasar dalam membangun karakter yang berintegritas. Dengan demikian, pendidikan karakter anti-korupsi bukan hanya menjadi sebuah teori, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang membawa perubahan bagi individu dan masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **A. PENDIDIKAN KARAKTER**

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atas kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai

tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, perkembangan budaya dan karakter dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila, jadi pendidikan budaya dan karakter adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. Pendidikan karakter atau pendidikan watak sejak awal munculnya pendidikan oleh para ahli dianggap sebagai suatu hal yang niscaya.

John Sewey, misalnya, pada tahun 1916 yang mengatakan bahwa sudah merupakan hal yang lumrah dalam teori pendidikan bahwa pembentukan watak merupakan tujuan umum pengajaran dan pendidikan budi pekerti di sekolah. Kemudian pada tahun 1918 di Amerika Serikat (AS), Komisi Pembaharuan Pendidikan Menengah yang ditunjuk oleh Perhimpunan Pendidikan Nasional melontarkan sebuah pernyataan bersejarah yaitu mengenai tujuan pendidikan umum. Lontaran itu dalam sejarah kemudian dikenal sebagai “Tujuh Prinsip Utama Pendidikan”, antara lain:

1. Kesehatan
2. Penguasaan proses-proses fundamental
3. Menjadi anggota keluarga yang berguna
4. Pekerjaan
5. Kewarganegaraan
6. Penggunaan waktu luang secara bermanfaat
7. Watak susila

Pendidikan ke arah terbentuknya karakter bangsa para siswa merupakan tanggungjawab semua guru. Oleh karena itu, pembinaannya pun harus oleh guru. Dengan demikian, kurang tepat jika dikatakan bahwa mendidik para siswa agar memiliki karakter bangsa hanya ditimpahkan pada guru mata pelajaran tertentu, misalnya guru PKN atau Guru PAI. Walaupun dapat dipahami bahwa yang dominan untuk mengajarkan pendidikan karakter bangsa adalah para guru yang relevan dengan pendidikan karakter bangsa. Tanpa terkecuali, semua guru harus menjadikan dirinya sebagai sosok teladan yang berwibawa bagi para

siswanya. Sebab tidak akan memiliki makna apapun bila seorang guru PKn mengajarkan menyelesaikan suatu masalah yang bertentangan dengan cara demokrasi, sementara guru lain dengan cara otoriter. Atau seorang guru pendidikan agama dalam menjawab pertanyaan para siswanya dengan cara yang nalar sementara guru lain hanya mengatakan asal-asalan dalam menjawab.

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tak pernah ditinggalkan. Sebagai sebuah proses, ada dua hal asumsi yang berbeda mengenai Pendidikan dalam kehidupan manusia. Pertama, bisa dianggap sebagai sebuah proses yang terjadi secara tidak disengaja atau berjalan secara alamiah. Pendidikan bukanlah proses yang diorganisasi secara teratur, terencana, dan menggunakan metode-metode yang dipelajari serta berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati mekanisme penyelenggaraannya oleh suatu komunitas masyarakat (Negara), melainkan lebih merupakan bagian dari kehidupan yang memang telah berjalan sejak manusia itu ada. Pengertian ini menunjuk bahwa pada dasarnya manusia secara alamiah merupakan makhluk yang belajar dari peristiwa alam dan gejala-gejala kehidupan yang ada untuk mengembangkan kehidupannya. Kedua, pendidikan dianggap sebagai proses yang terjadi secara sengaja, disengaja, dan diorganisasi berdasarkan aturan yang berlaku, terutama perundang-undangan yang dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat. Pendidikan sebagai sebuah kegiatan dan proses aktivitas yang disengaja ini merupakan gejala masyarakat ketika sudah mulai disadari pentingnya upaya untuk membentuk, mengarahkan, dan mengatur manusia sebagaimana dicita-citakan masyarakat terutama cita-cita orang yang mendapatkan kekuasaan. Cara mengatur manusia dalam pendidikan ini tentunya berkaitan dengan bagaimana masyarakat akan diatur. Artinya, tujuan dan pengorganisasian Pendidikan mengikuti arah perkembangan sosio-ekonomi yang berjalan. Jadi, ada aspek material yang menjelaskan bagaimana arah Pendidikan didesain berdasarkan siapa yang paling berkuasa dalam masyarakat tersebut.

Karakter merupakan perpaduan antara moral, etika, dan akhlak. Moral lebih menitik beratkan pada kualitas perbuatan, tindakan atau perilaku manusia atau apakah perbuatan itu bisa dikatakan baik atau buruk, atau benar atau salah. Sebaliknya, etika memberikan penilaian tentang baik dan buruk, berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu, sedangkan akhlak tatanannya lebih menekankan bahwa pada hakikatnya dalam diri manusia itu telah tertanam keyakinan di mana keduanya (baik dan buruk) itu ada. Karenanya, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, Pendidikan budi pekerti, pendidikan

moral, Pendidikan watak, yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

## **B. ANTI KORUPSI**

Dalam sejarah kehidupan manusia, korupsi bukan hal baru. Sejak manusia hidup bermasyarakat, sudah tumbuh perilaku koruptif atau menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma social yang berlaku. Manusia dan kelompok social yang hidup dalam persaingan memperebutkan tanah dan sumber daya alam untuk keperluan hidup, telah mendorongnya bertindak menyimpang, memanipulasi, menipu, dan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Perilaku koruptif manusia yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya memiliki variasi yang beranekaragam, sehingga pola-pola Tindakan korupsi juga banyak variasinya. Itulah sebabnya, dipahami bahwa korupsi bukan konsep sederhana.

Korupsi merupakan konsep yang kompleks, sekompleks persoalan yang dihadapi oleh suatu masyarakat atau pemerintahan. Demikian pula, mendefinisikan korupsi bukan pekerjaan yang mudah. Sebagaimana dinyatakan oleh Phil Williams, meningkatnya ragam korupsi akibat kecanggihan para pelaku yang menyebabkan pendefinisian korupsi terus dikaji ulang agar mendapat pemahaman yang sistematis (Sitepu, 2004: 1).

Perlu dikemukakan akar kata korupsi dan pengertian secara etimologis, sebelum diketengahkan definisi korupsi dari para pemerhati masalah korupsi. Korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*. Dari Bahasa Latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa, seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yakni *corruption* dan Belanda yaitu *corruptive*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata *corruptive* diserap ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Dalam Bahasa Muangthai, korupsi dinamakan *gin moun*, artinya makan bangsa; dalam Bahasa China, *tanwu*, artinya keserakahan bernoda; dan dalam Bahasa Jepang, *oshuku*, yang berarti kerja kotor (KPK, 2007: 2).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata *korup* artinya: buruk, rusak, busuk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 596-596). Dalam kamus tersebut, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang

negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 597). Dari istilah-istilah tersebut, korupsi dipahami sebagai perbuatan busuk, rusak, kotor, menggunakan uang atau barang milik lain (perusahaan atau negara) secara menyimpang yang menguntungkan diri sendiri. Korupsi melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, yang umumnya melibatkan kekuasaan public untuk keuntungan pribadi.

Johnson (2005: 12) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, jabatan public atau sumber untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut, terdapat empat komponen yang menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan korupsi, yaitu penyalahgunaan (abuse), public (public), pribadi (private), dan keuntungan (benefit). Dalam pandangan Johnson 2005: 16), dalam negara yang melaksanakan liberalisasi dan privatisasi dalam kegiatan ekonomi, akan muncul kecenderungan terjadinya pertukaran antara kesejahteraan (wealth) dan kekuasaan (power). Inilah yang oleh Johnson disebut dengan corruption syndromes.

Perbuatan korupsi berkaitan erat dengan kecurangan atau penipuan yang dilakukan. Berbuat curang atau menipu, berarti orang tersebut tidak jujur. Kejujuran memang merupakan suatu sikap dan perilaku yang langka di negeri ini. Dalam kenyataannya, tidak setiap orang jujur dalam kehidupan sehari-harinya

Ada 4 (empat) katagori kejujuran. Pertama, sejumlah orang jujur untuk setiap saat. Kedua, sejumlah orang tidak jujur untuk setiap saat. Ketiga, sebagian besar orang jujur untuk setiap saat. Keempat, sejumlah orang jujur hampir setiap saat. Dari empat tipe perilaku yang berkaitan dengan kejujuran tersebut, perilaku keempat yang paling baik dan relevan untuk menumbuhkan perilaku antikorupsi. Dalam kaitan dengan korupsi, kecurangan bisa mendorong perbuatan korupsi. Hal ini dapat terjadi karena adanya 3 (tiga) tiang penyangga korupsi, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalize). Tekanan seperti mengikuti gaya hidup modern, kerugian materi atau uang, terbelit hutang, akan menyebabkan seseorang berbuat curang atau korupsi. Orang yang memiliki kedudukan, jabatan, pangkat, dan pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki kesempatan untuk berbuat korupsi. Kesempatan itu dimiliki karena pihak koruptor memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kondisi departemen, kantor, atau lingkungannya. Selain itu, karena mereka memiliki otoritas untuk mengendalikan kegiatan atau pekerjaan.

Demikian pula, mereka mengetahui kelemahan di lingkungan departemen, kantor, dan pekerjaannya, sehingga dapat dimanipulasi yang menyebabkan pihak lain tidak tahu bahwa mereka telah melakukan korupsi. Perbuatan curang atau korupsi dikemas sedemikian rupa,

sehingga apa yang dilakukan seolah bukan tindakan korupsi. Inilah yang disebut dengan rasionalisasi perilaku korupsi. Ditambah oleh tidak adanya moral atau etika yang baik dari pelaku korupsi, menyebabkan perbuatan curang tersebut mempermudah orang melakukan korupsi.

Antikorupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi (Maheka, t.th: 31). Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Menurut Maheka (t.th: 31), peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan sistem (hukum dan kelembagaan) dan perbaikan manusianya. Dalam hal perbaikan sistem, langkah-langkah antikorupsi mencakup:

1. Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum;
2. Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi sederhana (simpler) dan efisien;
3. Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi serta memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi;
4. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas;
5. Penerapan prinsip-prinsip good governance;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya human error.

Berkaitan dengan perbaikan manusia, langkah-langkah antikorupsi meliputi:

1. Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, yaitu dengan mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi. Artinya bahwa pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya, menyatakan dengan tegas bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela, mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku korupsi, dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi;
2. Memperbaiki moral bangsa, yakni mengalihkan loyalitas keluarga, klan, suku, dan etnik ke loyalitas bangsa;
3. Meningkatkan kesadaran hukum individu dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan antikorupsi;

4. Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan;
5. Memilih pemimpin (semua level) yang bersih, jujur, antikorupsi, peduli, cepat tanggap (responsif) dan dapat menjadi teladan bagi yang dipimpin.

Upaya-upaya antikorupsi di berbagai negara seringkali mengalami kegagalan. Karena itulah, Pope (2007: xxxi) menyarankan hal-hal berikut agar upaya antikorupsi dapat mencapai keberhasilan.

1. Kemauan yang teguh di pihak pemimpin politik untuk memberantas korupsi dimanapun terjadi dan untuk diperiksa;
2. Menekankan pencegahan korupsi di masa datang dan perbaikan sistem;
3. Adaptasi undang-undang antikorupsi yang menyeluruh dan ditegakkan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai integritas;
4. Identifikasi kegiatan-kegiatan pemerintahan yang paling mudah menimbulkan rangsangan untuk korupsi dan meninjau kembali undang-undang terkait dan prosedur administrasi;
5. Program untuk memastikan bahwa gaji pegawai negeri dan pemimpin politik mencerminkan tanggung jawab jabatan masing-masing dan tidak jauh berbeda dari gaji di sektor swasta.
6. Penelitian mengenai upaya perbaikan hukum dan administrasi yang memastikan upaya hukum dan administrasi bersangkutan cukup mampu berfungsi sebagai penangkal korupsi;
7. Menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil;
8. Menjadikan korupsi sebagai perbuatan beresiko tinggi dan berlabar rendah;
9. Mengembangkan gaya manajemen yang selalu berubah yang memperkecil resiko bagi orang-orang yang terlibat dalam korupsi “kelas teri”, dan yang mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh politik, namun dilihat oleh masyarakat luas sebagai program yang adil dan masuk akal bagi situasi yang ada.

### C. ANTI KORUPSI DALAM KITAB MATIUS

Dalam Matius 6: 11 menentang korupsi sebab korupsi merupakan bentuk ketidakpedulian merawat iman sosial yang diwariskan Yesus, yaitu sikap sadar dan peduli pada kebutuhan sesama sebagaimana tercermin dalam seruan “makanan kami” dan “secukupnya”. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini sampai pada alternatif solusi, yaitu

menggalang pendidikan antikorupsi secara informal dan formal. Secara informal, orang tua diajak untuk membangun teladan hidup jujur sebagai habitus keluarga dan menjadikan rumah sebagai sekolah iman. Secara formal, perlu dilakukan integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam sejumlah mata pelajaran atau mata kuliah (pendekatan inklusif) dan menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran muatan lokal atau mata kuliah tersendiri (pendekatan eksklusif). Korupsi merupakan masalah global. Meskipun demikian, kadar korupsi di setiap negara berbeda-beda. Umur Turksen mengatakan bahwa korupsi sebagai kejahatan global menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah di seluruh dunia, baik negara maju atau berkembang. Di Indonesia, korupsi menjadi persoalan bangsa yang cukup signifikan, seolah-olah tidak ada penyelesaiannya, serta terjadi secara masif dan sistematis dari tingkat lokal hingga pusat. Dampak tindakan korupsi bagi negara dapat menimbulkan kesengsaraan rakyatnya, meruntuhkan pertumbuhan ekonomi, memperburuk kemiskinan, dan ketidakstabilan politik. Termutakhir, dalam laporan Indonesia Corruption Watch(ICW), jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus yang berarti cenderung naik dibanding periode yang sama di tahun sebelum-nya, yakni sebesar 169 kasus. Sementara, nilai kerugian negara, menurut ICW, meningkat dari Rp18,173 triliun (semester I 2020) menjadi Rp26,83 triliun (semester 1 2021). Terutama dalam empat tahun belakangan, nilai kerugian negara selalu menunjukkan tren peningkatan, sedangkan angka penindakan kasus korupsi fluktuatif.

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (an enormous destruction effects) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Menjadi musuh bersama dapat dimaknai sebagai membangun bangsa dengan mengubur dalam-dalam mental koruptif sehingga dapat menjadikan bangsa ini bersih dari segala bentuk kehancuran dan kemunduran peradaban. Peradaban dalam sudut pandang ini dapat juga dimaknai secara lebih sempit yakni “dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan, pemikiran atau sikap manusia. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum, perbuatan yang amoral dan tidak etis dari sisi sosial dan politis, dan bahkan sebagai dosa (melawan Allah) jika ditinjau dari sisi religiositas. Maka, secara khusus umat beragama wajib mengingatkan diri untuk tidak terjebak dalam kecenderungan dosa korupsi. Sebab dengan melakukannya, umat beragama, selain melanggar hukum negara, juga mencederai ajaran agamanya dan membawa pengaruh buruk dalam kehidupan bersama. Orang Kristen, sebagai umat beragama, diharapkan

mengingatkan dirinya agar menjadi individu-individu yang senantiasa mempromosikan nilai-nilai kejujuran di dalam setiap panggilan karir dan pekerjaannya. Orang Kristen harus dengan tegas dan mantap menolak korupsi. Teks Matius 6: 11 dapat dijadikan inspirasi perenungan kritis perihal alasan orang Kristen harus melawan korupsi di tengah “budaya korupsi” yang terus meneror bangsa Indonesia. Seruan “berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya” (Matius 6: 11) mengingatkan kepada setiap orang Kristen tentang keterkaitan dua dimensi utama dalam doa Tuhan.

Disampaikan dalam artikel ini berlaku juga bagi setiap individu untuk memerangi dan menentukan sikapnya dihadapkan fenomena korupsi yang menjamur di Indonesia. Dari perspektif Matius 6: 11 sebagai titik pijak refleksi, korupsi adalah tindakan yang ditentang. Matius 6: 11 ternyata tidak mendukung tindakan atau perilaku korupsi karena ternyata korupsi adalah ketidakpedulian pada iman sosial yang diwariskan oleh Yesus melalui doanya “Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya”. Doa ini mengajarkan sikap ingat akan kebutuhan atau hidup sesama dan selalu merasa cukup pada setiap rezeki dari Allah.

Matius 6: 11. Jika korupsi bermakna tidak peduli pada iman sosial, maka dalam relasi intim tak terlihat, orang Kristen juga menyangkal iman pribadi kepada Allah. Pada akhirnya, korupsi adalah perilaku yang harus dilawan oleh semua orang dan secara khusus oleh orang Kristen. Pendidikan antikorupsi dapat menjadi alternatif pencegah kecenderungan korupsi di masa depan.

#### **D. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MENANAMKAN DAN MENUMBUHKAN KARAKTER ANTI KORUPSI MENURUT KITAB MATIUS.**

Kitab Matius menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Dalam Matius 5:37, Yesus mengajarkan, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak; apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Pendidikan karakter anti korupsi dapat dimulai dengan mengajarkan pentingnya berbicara jujur dan menepati janji. Hal ini dapat ditanamkan pada siswa dari usia dini agar mereka menghargai nilai kejujuran dalam setiap aspek kehidupan mereka.

##### **➤ Menghindari Cinta Uang yang Berlebihan**

Matius 6:24 mengajarkan bahwa "Tidak seorang pun dapat mengabdikan kepada dua tuan. Karena, jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain; atau ia akan

setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain." Pendidikan karakter anti korupsi menurut ajaran ini mengajarkan untuk tidak menjadikan uang atau harta sebagai tujuan utama hidup, karena ini dapat mengarah pada perilaku korupsi. Dengan menanamkan nilai-nilai bahwa kekayaan bukanlah segalanya dan bahwa tujuan hidup adalah untuk memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, kita dapat memerangi perilaku korupsi.

➤ Menumbuhkan Kepedulian terhadap Keadilan

Matius 23:23 mengingatkan kita untuk tidak hanya memperhatikan hal-hal kecil (seperti persembahan), tetapi juga hal yang lebih besar seperti "keadilan, belas kasihan, dan iman." Pendidikan karakter anti korupsi dapat mengajarkan siswa untuk memperjuangkan keadilan dan menentang ketidakadilan, baik itu dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau ketimpangan sosial. Mengajarkan pentingnya keadilan akan membantu siswa memahami bahwa perilaku korupsi merusak tatanan sosial dan merugikan banyak pihak.

➤ Kepemimpinan yang Luhur

Matius 20:26-28 mengajarkan bahwa "barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Pendidikan karakter anti korupsi bisa menanamkan nilai kepemimpinan yang melayani, bukan memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi. Para pendidik dapat menekankan bahwa pemimpin yang sejati adalah orang yang melayani dan memperjuangkan kepentingan orang lain, bukan yang mencari keuntungan pribadi atau bertindak demi keuntungan pribadi melalui cara-cara yang tidak jujur.

➤ Mengembangkan Rasa Tanggung Jawab Sosial

Dalam Matius 25:40, Yesus mengatakan, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk Aku." Nilai ini mengajarkan pentingnya bertanggung jawab terhadap sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Korupsi sering kali mengabaikan kesejahteraan orang lain demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, pendidikan tentang tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain penting dalam menumbuhkan karakter anti korupsi.

• Pendidikan Melalui Teladan

Kitab Matius menggambarkan Yesus sebagai contoh yang sempurna dalam hidup yang penuh dengan integritas dan kebaikan. Melalui teladan hidupnya, Yesus menunjukkan bahwa karakter yang kuat dan hidup yang bersih dari korupsi dapat membentuk masyarakat yang

lebih baik. Dalam implementasi pendidikan, para guru, orang tua, dan pemimpin masyarakat harus memberi teladan yang baik agar ajaran ini dapat diterima dengan efektif.

## KESIMPULAN

Implementasi pendidikan dalam membangun dan menumbuhkan karakter anti-korupsi menurut Kitab Matius berakar pada ajaran Yesus tentang kebenaran, kejujuran, dan integritas. Injil Matius menekankan pentingnya hati yang murni, kesetiaan kepada Allah, serta sikap hidup yang menolak ketamakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Nilai-nilai seperti kasih, keadilan, dan kerendahan hati menjadi dasar dalam membentuk karakter yang menolak segala bentuk korupsi. Pendidikan anti-korupsi yang berlandaskan ajaran Yesus tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai Injil akan membentuk individu yang memiliki kesadaran moral tinggi, menjunjung kebenaran, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 321
- Eko, Handoyono. (2013). *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI*. (Anggota IKAPI). Yogyakarta. Penerbitan ombak 2013. Hal 18-23. 32-34.
- ICW: "Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya." *Tempo*, 21 Maret 2022, [hitpol data tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya](http://hitpol.data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya) Eko Ari
- Jefrie Walean, "Reinterpretasi Teks Keluaran 20:17 Untuk Memperkuat Pemberantasan Korupsi," *Discreet: Journal Didache of Christian Education* <https://ejournal.staknkupang.ac.id/ojs/index.php/dis/article/view/68>
- Johnson, *Korupsi: Penyalahgunaan Kekuasaan Untuk Kepentingan Pribadi*, 2005, 12
- KPK, *Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, 2007, 2.
- Maheka, Arya. T.th. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK RI.
- Moh. Yamin, *Pendidikan Anti Korupsi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), 17
- Nic Ryder, *White Collar Crime and Risk: Financial Crime, Corruption and the Financial Crisis* (London: Palgrave Macmillan, 2017), 45
- Nopan Omeri. *Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan*. Nitro PDF profesional. 465-466.
- Sitepu, *Dinamika Korupsi dan Strategi Pemberantasannya*, 2004, 1.